

TINJAUAN PERKEMBANGAN EKONOMI

Kondisi Ekonomi yang Semakin Memburuk, tetapi Terbuka Peluang untuk Perbaikan

Yose Rizal Damuri

PENGANTAR

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terlihat terus melambat. Setelah pada kuartal pertama ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 6,03% (*yoy*), yang lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya, maka pada kuartal kedua tahun ini pertumbuhan ekonomi hanya mencapai tingkat 5,81%. Turunnya aktifitas ekonomi ini disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan berbagai aspek, baik dari sisi produksi maupun permintaan.

Selain melambatnya pertumbuhan, kuartal kedua tahun 2013 ini juga memperlihatkan semakin memburuknya kinerja neraca pembayaran Indonesia. Defisit neraca berjalan (*current account*) terlihat semakin melebar yang disebabkan oleh penurunan ekspor dan peningkatan impor. Neraca perdagangan (*trade balance*) Indonesia juga telah mengalami defisit dan cenderung semakin memburuk. Ini telah menyebabkan tekanan yang sangat besar terhadap nilai tukar rupiah, yang telah terdepresiasi sebesar 10% selama Juli dan Agustus 2013. Situasi yang buruk ini diperparah lagi oleh meningkatnya inflasi. Pemerintah dihadapkan pada berbagai dilema antara mengendalikan nilai tukar dan inflasi serta meningkatkan pertumbuhan.

TREN PERLAMBATAN PERTUMBUHAN

Data pada semester pertama tahun 2013 menunjukkan penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi yang telah berlangsung sejak tahun 2012 terus berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi untuk tercatat hanya mencapai 5,81% (*yoy*); penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan kuartal sebelumnya, apalagi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 yang mencapai 6,2%. Tren penurunan ini diperkirakan akan terus berlangsung. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2013 hanya akan mencapai batas bawah dari kisaran 5,8%-6,2%, jauh dibawah target pertumbuhan sebesar 6,3%. **Tabel 1** memperlihatkan kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tabel 1. Komponen-komponen GDP Indonesia

	Mar12	Jun12	Sep12	Des12	(II) 2012	Mar13	Jun13	(I) 2013
PDB	6.29	6.36	6.16	6.11	6.23	6.03	5.81	5.92
PDB non petroleum dan gas	6.74	6.87	6.91	6.73	6.81	6.68	6.35	6.51
PDB berdasarkan Belanja								
Konsumsi Rumah Tangga	4.94	5.24	5.57	5.36	5.28	5.17	5.06	5.12
Pembelian Pemerintah	6.45	8.64	-2.81	-3.34	1.25	0.42	2.13	1.38
Investasi	9.97	12.47	9.80	7.29	9.81	5.78	4.67	5.21
Bangunan	7.21	7.32	7.65	7.79	7.50	7.00	6.88	6.94
Mesin dan Peralatan	16.05	20.93	11.36	4.34	12.71	0.00	-2.58	-1.35
Transportasi	27.08	52.86	25.90	10.10	27.31	-4.50	-1.42	1.31
Lain-lain	9.09	13.96	17.26	6.46	11.62	12.35	11.57	12.04
Ekspor	8.23	2.63	-2.56	0.50	2.01	3.57	4.78	4.18
Impor	8.95	11.33	-0.17	6.79	6.65	0.06	0.62	0.29
PDB berdasarkan Industri								
Tradables								
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	4.64	4.56	4.74	4.21	4.54	4.24	3.95	4.09
Pertambangan dan penggalian	4.27	3.96	5.30	1.98	3.97	3.61	3.20	3.40
Manufaktur dan gas	2.54	3.27	-0.27	0.48	1.49	-0.20	-1.19	-0.70
Tidak termasuk minyak	5.48	5.25	5.93	6.24	5.73	5.89	5.84	5.86
dan gas	5.95	6.18	6.70	6.70	6.39	6.38	5.81	6.09
Non-tradables								
Listrik, gas dan suplai air	5.68	6.49	6.11	7.25	6.40	6.55	6.60	6.58
Bangunan	7.21	7.32	7.65	7.79	7.50	7.00	6.88	6.94
Usaha Perdagangan, Hotel dan Resteran	8.74	8.74	7.23	7.80	8.11	6.54	6.47	6.50
Transportasi	6.54	5.78	7.09	6.84	6.57	6.22	7.91	7.08
Komunikasi	12.11	12.48	12.46	11.31	12.08	12.17	13.56	12.87
Keuangan dan Perbankan	6.36	7.08	7.45	7.66	7.15	8.35	8.07	8.21
Lain-lain	5.49	5.75	4.48	5.26	5.24	6.48	4.48	5.47

Sumber: CFIC Database

Perlambatan pertumbuhan ini disebabkan oleh perlambatan berbagai komponen produk domestik bruto (PDB), baik dari sisi permintaan maupun produksi. Perlambatan yang paling signifikan terjadi pada pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi. Setelah selama beberapa kuartal, PMTB meningkat secara pesat hingga tumbuh sebesar 9,81% pada tahun 2012, pada semester pertama investasi hanya meningkat sebesar 5,21%. Bahkan pertumbuhan pada kuartal kedua terlihat menurun dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan pada kuartal pertama. Perlambatan pembentukan modal ini terlihat dalam semua aspek, termasuk modal dalam bentuk konstruksi dan bangunan. Bahkan modal dalam bentuk mesin dan peralatan tercatat mengalami penurunan sebesar 1,35% selama semester pertama ini.

Sementara, permintaan ekspor mulai memperlihatkan perbaikan pada kuartal ini dengan pertumbuhan sebesar 4,8% setelah sebelumnya sempat mengalami penurunan. Ekspor yang melambat telah terlihat sejak beberapa waktu sebelumnya, dimana pertumbuhannya terus menurun sejak kuartal ketiga tahun 2011 dan tercatat mengalami penurunan pada tahun 2012. Penurunan harga dunia komoditas pertanian dan mineral, yang menjadi andalan ekspor Indonesia, serta melemahnya permintaan di pasar tujuan, melatarbelakangi penurunan tersebut. Tetapi melemahnya kinerja ekspor Indonesia juga dapat dilihat pada berbagai produk ekspor lainnya. Hanya konsumsi swasta yang tidak memperlihatkan perlambatan, walaupun juga tidak mengalami penurunan. Tampaknya di masa mendatang, konsumsi swasta akan masih menjadi penggerak pertumbuhan, mengingat kuatnya tren pelemahan pada aspek pertumbuhan lainnya.

Dari sisi produksi, nilai tambah yang dihasilkan lebih banyak terkonsentrasi pada bidang jasa-jasa yang mengambil porsi sekitar 55% dari PDB. Sektor yang berkembang pesat terutama adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, finansial dan komunikasi yang tumbuh masing-masing lebih dari 6%, 8% dan 12%. Pertumbuhan sektor manufaktur terlihat stabil, dengan sub-sektor diluar pertambangan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, terutama pada sub-sektor transportasi dan mesin, dan kimia.

Sementara itu, akibat turunnya permintaan pasar global, ditambah oleh berbagai kebijakan yang tidak mendukung, sektor pertambangan Indonesia mengalami penurunan produksi hampir 1%. Perlambatan pada sektor ini telah terlihat sejak beberapa waktu lalu dan terus mengalami penurunan. Kekhawatiran dunia usaha pertambangan dengan diberlakukannya berbagai aturan sesuai dengan Undang-Undang No 4 tahun 2009 menyebabkan jaranginya eksplorasi pertambangan baru, bahkan penutupan beberapa usaha pertambangan.

KINERJA NERACA PEMBAYARAN INDONESIA

Neraca pembayaran (*balance of payment*) Indonesia terlihat agak membaik dibandingkan dengan kondisi kuartal pertama tahun ini (Tabel 2). Setelah di kuartal pertama, kedua neraca berjalan dan neraca modal dan keuangan (*financial and capital account*) mencatatkan defisit, semester kedua ini neraca keuangan dan modal kembali mencatatkan surplus. Tetapi tekanan terhadap neraca berjalan terus berlanjut hingga kuartal kedua tahun ini.

Neraca Berjalan

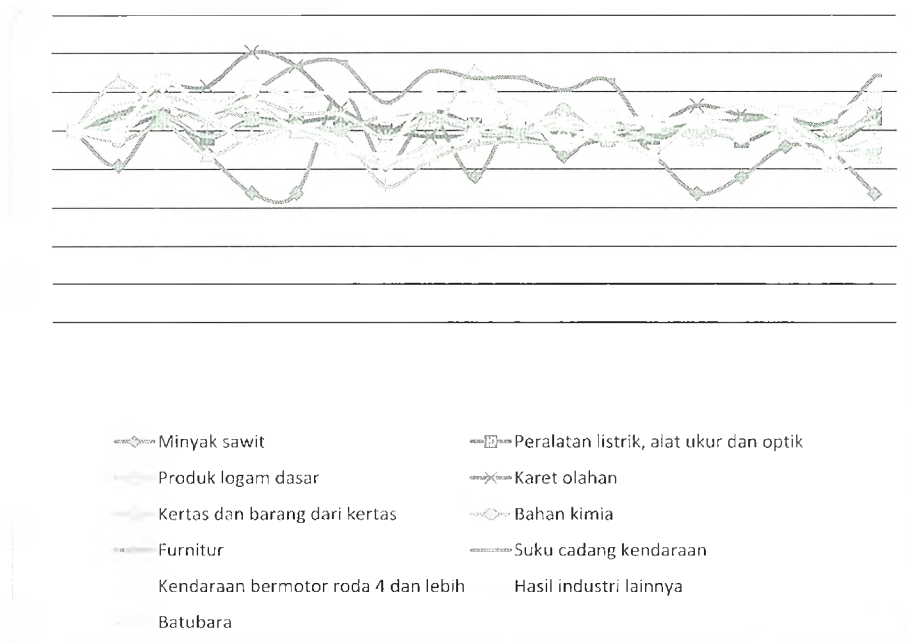
Sejak kuartal pertama 2012 neraca berjalan Indonesia terus mengalami defisit dan terus mengalami tren penurunan. Pada kuartal kedua 2013, defisit neraca berjalan hampir mencapai nilai US\$ 9,9 miliar, yang berarti naik sebesar 20% dari defisit pada kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Defisit neraca berjalan ini disebabkan oleh turunnya nilai neraca perdagangan barang Indonesia, yang pada kuartal ini mencatatkan defisit pula. Situasi ini diperburuk lagi oleh defisit yang juga terjadi pada neraca jasa-jasa (*services account*) dan neraca pendapatan (*income account*).

Meskipun neraca berjalan yang defisit bukanlah hal yang baru bagi Indonesia, perkembangan beberapa waktu ini memperlihatkan situasi baru yang dapat mempengaruhi ketahanan ekonomi negara ini di masa mendatang. Salah satunya adalah nilai defisit kuartal ini yang terus membengkak hingga mencapai 4,4%, angka yang jauh di atas kinerja neraca berjalan Indonesia selama ini. Selain itu, ada juga fakta bahwa neraca perdagangan barang terus mengalami penurunan,

bahkan defisit pada kuartal kedua ini, yang disebabkan oleh turunnya nilai ekspor, sementara nilai impor cenderung meningkat. Statistik bulanan dari neraca perdagangan barang telah mencatatkan defisit di beberapa bulan sejak awal 2012.

Penurunan nilai ekspor terlihat pada berbagai produksi Indonesia, tetapi terutama pada berbagai komoditas perkebunan dan mineral yang selama ini merupakan produk-produk unggulan ekspor Indonesia. **Gambar 1** menunjukkan penurunan nilai ekspor Indonesia untuk beberapa komoditas dan produk dari Indonesia. Beberapa komoditas unggulan, seperti produk sawit dan CPO terus mengalami penurunan. Jika dibandingkan Januari 2012, nilai ekspor pada akhir bulan Juni telah turun hingga sekitar 35%. Nilai ekspor batubara juga mengalami penurunan tajam selama beberapa bulan terakhir. Dibandingkan dengan akhir tahun 2012, ekspor batubara telah mengalami penurunan sekitar 12%.

Gambar 1. Komoditi Ekspor Indonesia



Sumber: CEIC Database

Penurunan ekspor komoditas ini dipicu oleh berbagai hal. Pelemahan permintaan dunia untuk berbagai produk komoditas penting ekspor Indonesia telah menyebabkan turunnya harga dunia dan penurunan volume ekspor. Sejak Januari 2012, harga dunia *crude palm oil* (CPO) telah turun hampir 30%. Tetapi ekspor beberapa produk manufaktur juga mengalami penurunan. Produk bahan kimia, misalnya, turun sebesar 6% selama satu tahun belakangan ini. Produk-produk logam dasar juga mengalami penurunan cukup signifikan seperti halnya ekspor kendaraan bermotor roda empat. Berbagai permasalahan struktural yang mempengaruhi daya saing industri di Indonesia menjadi penyebab dari memburuknya kinerja ekspor. Ini termasuk rendahnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur, buruknya iklim bisnis dan investasi, serta permasalahan tenaga kerja.

Sementara itu, nilai impor terlihat stabil bahkan cenderung meningkat. Impor bahan baku dan bahan penolong merupakan bagian terbesar dari impor Indonesia; mencapai sekitar 70% dari total impor dan cenderung mengalami peningkatan. Patut diperhatikan bahwa 22% dari impor bahan baku dan penolong adalah impor minyak dan produk olahannya yang semakin membesar. Peningkatan impor produk minyak ini berkaitan dengan tingginya konsumsi dalam negeri dan meningkatnya harga minyak dunia. Subsidi BBM yang diberikan semakin mendorong peningkatan konsumsi dan impor produk minyak.

Neraca perdagangan jasa-jasa juga terus menunjukkan angka negatif dikarenakan impor jasa yang lebih besar dari ekspor. Sebanyak 37% impor jasa disumbangkan oleh impor jasa pengangkutan barang, yang semakin meningkat ketika perdagangan, terutama impor, menjadi lebih intensif. Neraca pendapatan juga terus mencatatkan defisit pada kuartal ke dua tahun 2013 ini. Defisit pada seluruh bagian dari neraca berjalan menjadikan Indonesia mengalami tekanan defisit yang cukup tinggi.

Neraca Modal dan Keuangan

Selain defisit pada neraca berjalan, neraca pembayaran Indonesia juga sempat mencatatkan angka negatif pada neraca keuangan dan modal pada kuartal pertama tahun ini, walaupun telah membaik

pada kuartal kedua ini. Hanya saja aliran modal yang masuk pada kuartal ini masih belum dapat menambal defisit yang terjadi pada neraca berjalan, sehingga secara keseluruhan neraca pembayaran Indonesia masih mengalami defisit yang cukup besar, walaupun terlihat menurun dibandingkan dengan kuartal lalu.

Defisit pada neraca modal dan keuangan yang terjadi pada kuartal pertama lebih disebabkan oleh pelarian modal (*capital flight*) yang terjadi pada investasi tidak langsung. Pelarian modal tersebut terjadi karena beberapa hal. Tetapi faktor eksternal, termasuk isu penghentian kebijakan ekspansif dari *Federal Reserve (the Fed)* Amerika Serikat menjadi salah satu faktor yang cukup penting¹. Faktor internal seperti memburuknya kondisi neraca perdagangan menambah sentimen negatif terhadap pasar keuangan dan modal Indonesia.

Tabel 2. Neraca Pembayaran Indonesia (Juta US Dollar)

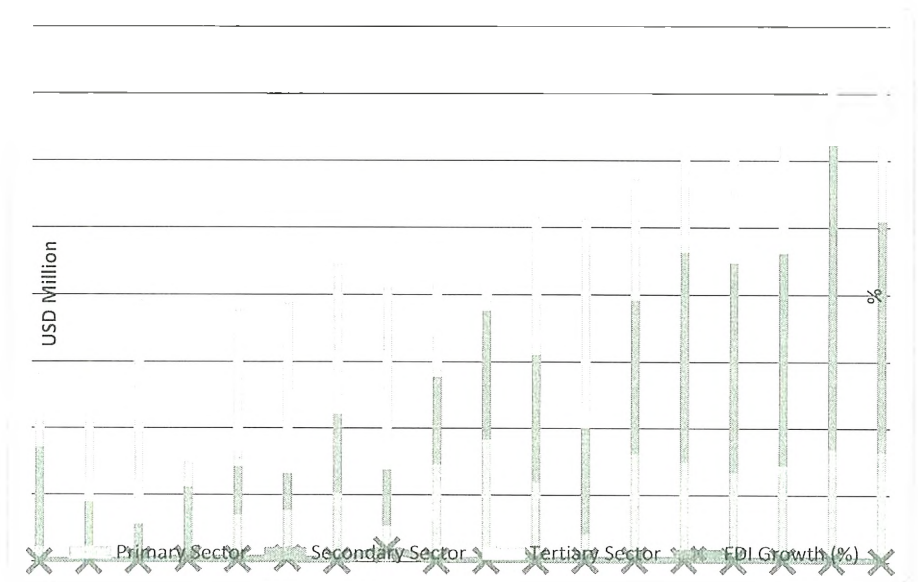
	Mar 12	Jun 12	Sep 12	Dec 12	Mar 13	Jun 13
Neraca Berjalan	-3,164.20	-8,175.68	-5,263.59	-7,827.29	-5,819.35	-9,848.28
Neraca Berjalan (% of GDP)	-1.5	-3.7	-2.4	-3.6	-2.6	-4.4
Ekspor	48,352.91	47,537.92	45,549.40	47,056.12	45,231.12	45,670.4
Non-minyak dan gas	38,572.11	38,433.34	37,418.01	38,501.47	36,758.13	37,757.13
Minyak dan gas	9,780.80	9,104.58	8,131.40	8,554.65	8,472.99	7,913.30
Impor	44,543.12	46,720.16	42,359.68	46,255.22	43,628.85	46,271.5
Non-minyak dan gas	33,878.44	36,459.76	33,449.57	35,280.02	32,301.00	36,095.05
Minyak dan gas	10,664.67	10,260.40	8,910.10	10,975.20	11,327.84	10,176.46
Neraca Perdagangan barang	3,809.80	817.76	3,189.73	800.91	1,602.28	-601.06
Non-minyak dan gas	4,693.67	1,973.58	3,968.43	3,221.45	4,457.13	1,662.10
Minyak dan gas	-883.87	-1,155.82	-778.71	-2,420.55	-2,854.85	-2,263.17
Jasa	-1,983.41	-2,790.07	-2,359.41	-3,197.94	-2,479.78	-3,069.73
Pendapatan	-6,048.23	-7,101.09	-6,955.15	-6,643.05	-6,043.53	-7,139.67
Transfer Berjalan	1,057.64	897.73	861.25	1,212.79	1,101.69	962.19
Neraca Modal dan Keuangan	2,096.12	5,087.39	5,885.04	12,079.67	-327.51	8,198.74
Neraca Modal	5.49	2.65	7.51	21.81	1.25	2.46
Neraca Keuangan	2,090.62	5,084.74	5,877.53	12,057.86	-328.76	8,196.28
Investasi Langsung	1,550.34	3,746.62	4,538.98	4,145.94	3,876.46	3,323.94
Investasi Portfolio	2,627.65	3,873.13	2,515.73	189.93	2,760.45	2,529.41
Investasi Lain-lain	-2,087.37	-2,535.02	-1,177.18	7,721.99	-6,965.67	2,342.92

¹ Untuk mengantisipasi krisis finansial pada tahun 2008, *the Fed* menjalankan kebijakan ekspansif yang dikenal dengan sebutan *quantitative easing* (QE), yang saat ini telah berada pada tahap ketiga. QE ini menyebabkan dana keuangan global berpindah ke pasar keuangan negara berkembang, termasuk Indonesia. Sejak beberapa bulan lalu *the Fed* memberikan indikasi untuk menghentikan kebijakan tersebut. Ini menyebabkan pelarian modal dari negara berkembang ke pasar uang Amerika Serikat.

Total Utang Luar Negeri	228,760.65	238,916.78	243,649.33	252,364.23	254,294.78	257,980.0
Utang jangka Pendek	36,905.60	39,771.53	39,496.25	44,253.42	46,133.78	46,677.90
Utang jangka Panjang	111,093.42	112,068.10	114,273.67	115,297.08	113,450.22	113,638.9
Eror dan Omisi	34.00	277.00	213.00	-1,027.12	-468.00	-827.00
Saldo Keseluruhan	-1,034.08	-2,811.29	834.45	3,225.26	-6,614.86	-2,476.54
Cadangan Devisa	110.49	106.50	110.17	112.78	104.80	98.10
Rasio utang jangka pendek terhadap devisa negara%	41.40	45.40	44.20	48.50	50.90	55.70
Rasio utang luar negeri terhadap PDB%	26.20	27.10	27.80	28.70	34.80	41.40
Penutupan Utang sebagai bagian dari ekspor barang dan jasa	30.30	35.00	35.20	39.40	28.60	29.00

Sumber: Bank Indonesia

Gambar 2. Realisasi Penanaman Modal Asing Langsung di Sektor Primer, Sekunder dan Tersier



Sumber: CEIC Database

Investasi asing langsung masih menjadi penyumbang terbesar dalam neraca modal dan keuangan, sekitar 40%, walaupun terlihat adanya sedikit penurunan pada kuartal kedua ini. Tetapi sepanjang semester pertama tahun 2013, investasi asing langsung masih terlihat

tumbuh positif, naik sebesar 36% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. **Gambar 2** menunjukkan realisasi penanaman modal asing langsung. Investasi asing terlihat lebih dominan pada sektor sekunder seperti manufaktur, dan sektor tersier, termasuk jasa dan utilitas. Investasi pada sektor tersier selama semester pertama tahun ini mengalami kenaikan hingga 46 dibandingkan periode yang sama di tahun 2012. Sementara investasi di sektor primer terlihat tidak mengalami banyak perubahan.

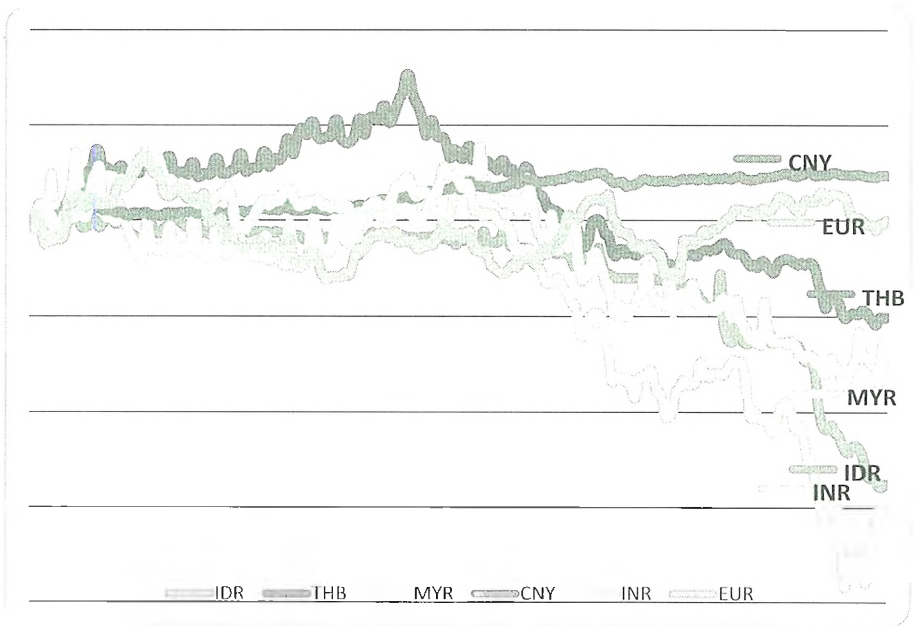
NILAI TUKAR DAN TEKANAN INFLASI

Kondisi neraca pembayaran yang tidak menguntungkan tersebut telah membawa beberapa dampak negatif terhadap situasi perekonomian makro Indonesia. Dampak yang langsung terlihat adalah penyesuaian pada nilai tukar rupiah. Dengan membengkaknya neraca berjalan dan neraca pembayaran yang telah defisit, kebutuhan akan valuta asing melebihi. Bank Indonesia beberapa kali melakukan intervensi dengan melepaskan cadangan devisa untuk menutup kebutuhan tersebut. Akibatnya posisi cadangan devisa pada akhir semester pertama tahun 2013 telah turun sebesar 14% dibandingkan posisi akhir tahun lalu.

Tetapi intervensi tersebut tidak dapat menahan laju depresiasi Rupiah secara efektif. Sejak awal tahun ini hingga akhir bulan Agustus 2013, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS telah terdepresiasi sebesar 13%. **Gambar 3** memberikan penjelasan mengenai pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS dibandingkan dengan mata uang lain di wilayah Asia.

Seperti dapat dilihat, penurunan nilai tukar tidak hanya terjadi pada Rupiah, tetapi juga pada mata uang lainnya seperti Bath Thailand dan Rupee India yang turun hingga 5% dan 18%. Seperti dijelaskan sebelumnya, sentimen pasar uang global telah mempengaruhi nilai tukar berbagai mata uang negara-negara berkembang. Ini diperparah oleh defisit neraca berjalan Indonesia yang terus melebar. Nilai tukar yang melemah diharapkan akan dapat meningkatkan daya saing ekspor dan membuat impor menjadi lebih mahal. Akibatnya ekspor diharapkan akan meningkat sementara, sedangkan impor akan berkurang dan defisit neraca berjalan akan mengecil. Tetapi ada

Gambar 3. Pergerakan Nilai Tukar



Sumber: CEIC Database

berbagai kondisi yang patut dipenuhi agar penyesuaian mata uang mempunyai efek yang berarti pada nilai neraca berjalan. Kondisi yang pertama adalah seberapa responsifnya pengeluaran konsumen, baik di dalam negeri maupun luar negeri terhadap perubahan harga. Semakin elastis permintaan terhadap barang ekspor, akan semakin tinggi kenaikan ekspor. Sementara, semakin elastis permintaan terhadap barang impor akan semakin besar penurunan impor yang terjadi akibat dari depresiasi².

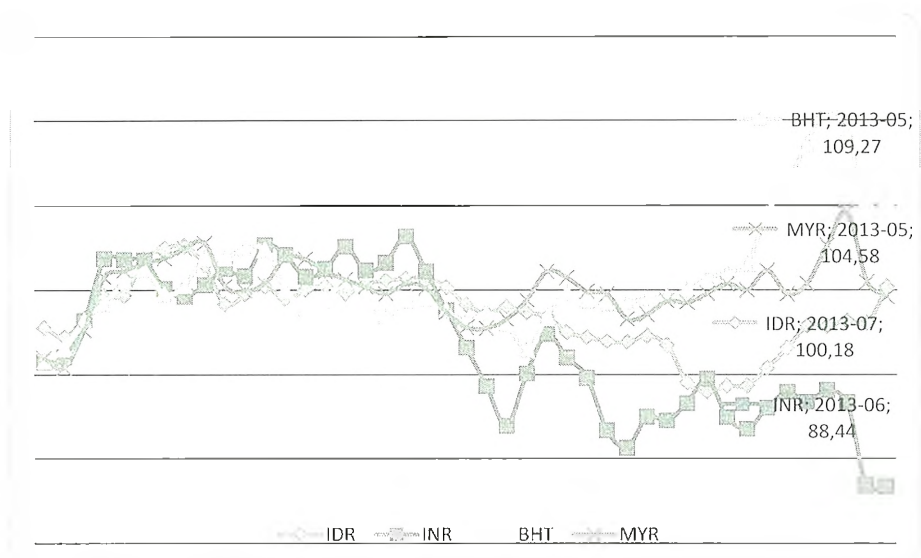
Kondisi kedua adalah seberapa besar depresiasi dapat ditranslasikan kepada perubahan harga, baik untuk barang ekspor maupun barang impor. Dengan praktik produksi internasional saat ini, dimana berbagai bahan baku dari suatu produk dihasilkan di berbagai negara, maka impor merupakan bagian penting dari produksi, termasuk untuk produk yang diekspor. Akibatnya,

² Kondisi ini dikenal dengan nama *Marshall-Lerner Condition*. Secara lebih formal kondisi tersebut digambarkan dengan elastisitas impor dan ekspor yang lebih besar daripada satu.

kenaikan harga bahan baku impor akibat dari depresiasi juga akan mempengaruhi harga dari produk dalam negeri dan juga harga ekspor. Daya saing ekspor yang diharapkan akan meningkat tidak dapat terrealisasi dengan baik karena harga barang-barang ekspor juga akan meningkat.

Salah satu cara untuk memperkirakan efek dari depresiasi adalah dengan melihat *real effective exchange rate* (REER). Disini nilai tukar mata uang dibandingkan dengan perubahan tingkat harga-harga baik untuk dalam negeri maupun luar negeri. **Gambar 4** memperlihatkan REER bulanan untuk beberapa mata uang sejak tahun 2010. REER dibawah nilai 100 menunjukkan bahwa mata uang tersebut cenderung *undervalued*. Penurunan REER juga menunjukkan bahwa secara riil terjadi depresiasi terhadap nilai mata uang yang berujung pada peningkatan daya saing barang ekspor. Sebaliknya kenaikan REER mengindikasikan adanya penurunan daya saing barang ekspor.

Gambar 4. Real Effective Exchange Rate Bulanan



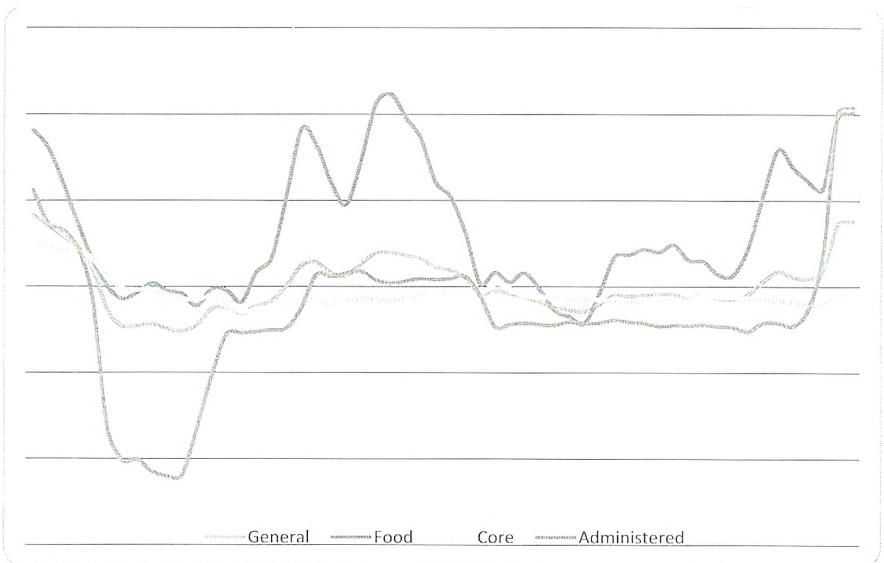
Sumber: Bank of International Settlement

Disini terlihat bahwa walaupun secara nominal nilai rupiah mengalami pelemahan yang cukup signifikan, ini juga diikuti oleh

kenaikan tingkat harga barang-barang produksi Indonesia yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan tingkat harga internasional. Akibatnya REER Rupiah terlihat cenderung meningkat selama tahun 2013 ini, bahkan terlihat agak *overvalued* pada bulan Juli dan Agustus. Ini mengindikasikan bahwa depresiasi nilai tukar kemungkinan tidak akan meningkatkan daya saing ekspor dan juga sulit untuk menekan impor. Akibatnya defisit neraca perdagangan kemungkinan masih akan terus berlanjut.

Tekanan inflasi di tahun 2013 ini terus menguat. Hingga akhir bulan Agustus, indeks harga konsumen (IHK) telah naik sebanyak 7,9%, sementara dibandingkan dengan tahun sebelumnya, inflasi telah mencapai 8,9%. **Gambar 5** memperlihatkan tingkat inflasi bulanan untuk beberapa jenis barang. Kenaikan harga yang tinggi dapat dilihat pada jenis barang-barang makanan serta barang-barang yang harganya diadministrasi. Tekanan inflasi tampak terkendali di kuartal kedua tahun 2013 ini dimana beberapa bulan bahkan mengalami deflasi. Tetapi sejak bulan Juni arah inflasi berubah dengan tekanan yang semakin menguat.

Gambar 5. Inflasi Bulanan



Sumber: COMTRADE Database

Kenaikan harga tersebut dipicu oleh faktor musiman dan juga kebijakan pemerintah. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, tingkat harga cenderung mengalami kenaikan selama bulan Ramadhan dan sesudahnya, ketika umat Muslim menjalankan ibadah puasa dan merayakan hari raya Idul Fitri. Pada tanggal 22 Juni, pemerintah Indonesia mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 2000 untuk jenis premium dan Rp 1000 untuk jenis solar. Kenaikan harga BBM tersebut telah memicu kenaikan harga, apalagi bersamaan waktunya dengan datangnya bulan Ramadhan dimana harga cenderung mengalami kenaikan. Ongkos transportasi naik sekitar 10-20% yang mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen. Ini menyebabkan IHK naik sekitar 1,03% pada bulan Juni dan berlanjut naik kembali sebesar 3,29% pada bulan berikutnya. Untungnya tingkat harga pada bulan April dan Mei mengalami penurunan sehingga dampak kenaikan terhadap inflasi tahunan dapat sedikit diredam. Inflasi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi sendiri hanya bersifat sementara.

Efek dari berbagai kebijakan restriksi terhadap impor bahan makanan juga menyumbang pada kenaikan tingkat harga. Kuota impor terhadap berbagai bahan makanan seperti daging sapi dan kedelai telah menyebabkan kelangkaan di pasar dan turut menaikkan harga hingga hampir 100% untuk beberapa jenis makanan. Tekanan inflasi diperkirakan akan terus berlanjut, meskipun kenaikan harga diharapkan agak berkurang di beberapa bulan ke depan.

APBN-P 2013 dan APBN 2014

Fiskal 2013

Dengan semakin tingginya tekanan negatif terhadap situasi perekonomian Indonesia, pemerintah akhirnya menetapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan untuk tahun anggaran 2013 ini. Anggaran ini merubah berbagai hal penting, termasuk asumsi yang digunakan untuk mengakomodasi berbagai situasi perekonomian yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan dalam menyusun APBN 2013. Tetapi perubahan yang paling penting adalah pada penyesuaian nilai subsidi energi yang mencoba merefleksikan

perubahan harga jual BBM bersubsidi. Kolom pertama dan kedua dari Tabel 3 memberikan item penting dalam APBN dan APBN-P tahun anggaran 2013

Asumsi pertumbuhan PDB di dalam APBN-P ini berubah dari 6,8% menjadi 6,3%. Lifting minyak bumi ditargetkan naik dari 840 ribu barel per hari (bph) menjadi 900 ribu bph, sementara harganya naik menjadi 108 dollar per barrel dari sebelumnya 100 dollar. Dengan perubahan asumsi ini, target penerimaan juga mengalami perubahan. Penerimaan pemerintah turun sebesar 3 persen menjadi Rp 1.502 triliun akibat turunnya pendapatan yang diharapkan bisa dikumpulkan dari pajak. Penerimaan pajak diperkirakan turun sebesar 4% dari target yang semula ditetapkan dalam APBN 2013; penurunan terutama terjadi pada pajak penghasilan yang turun lebih dari 7%.

Pengeluaran pemerintah di APBN-P ini naik sebesar 3% menjadi Rp 1.706 triliun. Peningkatan terbesar terjadi pada pengeluaran untuk subsidi, terutama subsidi untuk BBM dan subsidi sosial. Meskipun pemerintah menaikkan harga jual BBM bersubsidi dari Rp 4,500 menjadi Rp 6,500, kenaikan konsumsi dan harga beli internasional, serta melemahnya nilai tukar rupiah, menyebabkan subsidi BBM tetap meningkat dari Rp 194 triliun menjadi Rp 200 triliun. Konsumsi BBM bersubsidi diperkirakan naik menjadi 48 juta kiloliter untuk tahun ini, naik dari target sebelumnya yang hanya 46 juta kiloliter. Jika pemerintah tidak menaikkan harga jual BBM bersubsidi diperkirakan subsidi BBM akan bertambah lebih dari Rp 40 triliun. Subsidi energi juga bertambah dengan meningkatnya subsidi listrik sebesar lebih dari Rp 19 triliun.

Pengeluaran untuk bantuan sosial juga bertambah sebesar Rp 7 triliun, disebabkan oleh meningkatnya subsidi langsung sebagai bagian dari paket kompensasi kenaikan harga BBM sebesar Rp 29 triliun. Paket kompensasi tersebut terdiri dari beberapa jenis yang bertujuan untuk mengurangi dampak kenaikan harga dalam jangka pendek, termasuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk 15,5 juta keluarga sebesar Rp 150.000 per bulan selama empat bulan. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan dana lebih besar untuk bantuan kepada siswa miskin (BSM) disamping meningkatkan pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur.

Dengan peningkatan pengeluaran dan menurunnya pemasukan, APBN-P mencatatkan penambahan defisit anggaran yang lebih besar. Defisit naik dari 1,7% dari PDB menjadi 2,4%. Peningkatan defisit ini akan ditutupi oleh sumber pembiayaan dalam negeri sebesar Rp 241 triliun, Rp 68 triliun lebih tinggi dari target pada APBN sebelumnya. Bertambahnya kebutuhan untuk menutupi defisit ini memberikan tantangan yang berat kepada pemerintah mengingat situasi pasar keuangan domestik dan internasional yang cenderung meminta pengembalian pinjaman lebih tinggi.

Selama semester pertama 2013, realisasi anggaran pemerintah menunjukkan defisit sebesar Rp 54,5 triliun. Situasi ini agak diluar kebiasaan, dimana realisasi anggaran pada semester pertama biasanya masih terlihat positif dikarenakan pengeluaran yang belum berjalan sepenuhnya. Realisasi pendapatan selama semester ini tercatat sebesar 41% dari anggaran, sementara realisasi pengeluaran juga hampir mendekati 40%. Realisasi pengeluaran tersebut berada di atas realisasi pengeluaran pada tahun-tahun sebelumnya yang berkisar pada angka 30-35%. Beberapa item pengeluaran telah terealisasi sebesar lebih dari 40%, seperti subsidi BBM yang telah mencapai 49% dari angka di APBN-P atau sekitar 51% dari APBN. Tingginya pengeluaran subsidi BBM pada semester pertama ini terkait dengan konsumsi BBM yang mencapai 23,8 juta kiloliter pada semester pertama ini. Diharapkan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, konsumsi akan berkurang dan mengurangi subsidi yang harus dikeluarkan di semester kedua, walaupun melemahnya nilai tukar kemungkinan akan meningkatkan subsidi tersebut.

Fiskal 2014

Pada tanggal 16 Agustus, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan APBN 2104. Anggaran belanja ini mengundang banyak kritik dikarenakan asumsi dan target ekonomi yang dinilai jauh dari kondisi yang ada. Anggaran ini dibangun dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6,4%, angka yang jauh dibandingkan dengan PDB tahun 2013 yang diperkirakan hanya berkisar antara 5,6-5,9%. Sementara itu inflasi dan nilai tukar ditargetkan hanya mencapai 4,5% dan Rp 9.750, jauh dibawah angka

saat ini. Hanya dua minggu setelah anggaran 2014 ini diumumkan, pemerintah mengumumkan niat untuk merevisi anggaran tadi dengan menggunakan beberapa asumsi baru yang dinilai lebih realistis. Asumsi pertumbuhan ekonomi diturunkan menjadi pada kisaran 5,8-6,1% sementara inflasi dan nilai tukar dinaikan menjadi 4,5-5,% dan kisaran Rp10.000 hingga Rp10.500 per dolar AS.

Asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 yang sebelumnya ditetapkan sebesar 6,4 persen dikoreksi menjadi pada kisaran 5,8 persen hingga 6,1 persen. Sementara, asumsi nilai tukar rupiah pada tahun 2014 yang sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp9.750 per dolar AS dikoreksi pada kisaran Rp10.000 hingga Rp10.500 per dolar AS. Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan diasumsikan tetap berada pada level 5,5 persen. Asumsi harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price*) pada tahun 2014 juga tetap diperkirakan sebesar 106 dolar AS per barel, asumsi lifting minyak mentah tetap 870 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 1.240 ribu barel setara minyak per hari.

Dengan perubahan ini, angka anggaran penerimaan dan belanja negara juga mengalami perubahan. Saat ini pembicaraan mengenai besaran dari RAPBN yang baru masih dibicarakan antara pemerintah dengan DPR. Beberapa item yang akan mengalami perubahan cukup signifikan diantaranya adalah penerimaan perpajakan yang turun 2,3% dibandingkan angka yang diajukan dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2014 menjadi Rp1.280,4 triliun. Besaran pengeluaran diharapkan tidak berubah banyak, kecuali untuk subsidi BBM yang akan naik sedikit akibat kenaikan asumsi nilai tukar.

Tabel 3. Anggaran Negara Indonesia (Miliar Rupiah)

	2013 Budget	2013 Revised	(I) 2013 Realisation	2014 Draft
	<u>1529.673,</u>			
PENDAPATAN DAN HIBAH	1	1502.0	623.2	1662.5
Pendapatan dalam negeri	5	1497.5	622.4	1661.1
Penerimaan Perpajakan	1192.994,			
Pendapatan Pajak dalam Negeri	1	1148.4	485.4	1310.2
Pendapatan Pajak Penghasilan	2	1099.9	464.0	1256.3
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	584.890,4	538.8	240.2	591.6
Pendapatan Pajak lainnya	423.708,3	423.7	168.0	518.9
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	125.690,5	137.5	2.4	145.8
Penerimaan Negara bukan Pajak	58.704,9	48.4	21.4	53.9
Penerimaan SDA	332.195,4	349.2	137.1	350.9
Penerimaan Bagian Laba BUMN	197.204,9	203.7	73.2	198.1
Pendapatan lainnya	33.5	36.5	27.1	37.0
Hibah	4.483,6	4.5	0.8	1.4
	<u>1683.011,</u>			
BELANJA NEGARA	1	1726.2	677.7	1816.7
Belanja Negara Pemerintah Pusat	9	1196.8	421.1	1230.3
Belanja Pegawai	1154.380,			
Belanja Barang	241.606,3	233.0	106.9	276.7
Belanja Modal	200.735,2	206.5	45.1	203.7
Pembayaran Bunga Utang	184.363,5	192.6	34.0	205.8
Subsidi	113.243,8	112.5	52.8	119.5
Energi	317.218,6	348.1	155.5	336.2
BBM	274.743	299.8	140.7	284.7
Listrik	193.805,2	199.9	98.2	194.9
Non Energi	80.937,8	100.0	42.5	89.8
Belanja I Hibah	42.475,6	48.3	14.9	51.6
Bantuan Sosial	3.621,3	2.3	0.0	3.5
Belanja Lain-lain	73.608,8	82.5	26.0	55.9
Transfer ke Daerah	19.983,4	19.3	0.7	28,9
Surplus/Defisit Anggaran (A-B)	528.630,2	529.4	256.6	586.4
	<u>-153.338</u>	<u>-224.2</u>	<u>-54.5</u>	<u>-154.2</u>
(% of PDB)	-1.65	-2.4	-0.58	-1.5

Pembiayaan	<u>153.338</u>	<u>224,2</u>	<u>82,1</u>	<u>154,2</u>
Pembiayaan Dalam Negeri	172.792,1	241,1	103,0	173,2
Pembiayaan Luar Negeri	19.454,2	-16,9	-20,8	-19,0
ASUMSI MAKRO EKONOMI				
Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	6,8	6,3	6,1 (Projection)	6,4
Inflasi (% yoy)	4,9	7,2	5,9	4,5
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	9300	9600,0	3,8	9750,0
Suku Bunga SPN 3 bulan rata-rata (%)	5	5,0	9,7	5,5
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barrel)	100	108,0	105,0	106,0
Lifting Minyak (ribu barrel per hari)	900	840,0	827,0	870,0
Konsumsi BBM Domestik (millionkl.)	46,01	48	22,74	48

Sumber: *Nota Keuangan Republik Indonesia*

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI

Ditengah situasi perekonomian yang semakin memburuk, terutama dengan pelemahan rupiah, pelarian modal dan perlambatan pertumbuhan, pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa tindakan yang diharapkan dapat memperbaiki kinerja perekonomian ke depan. Paket kebijakan ini terbagi dalam empat kebijakan dengan target yang ditentukan. Kebijakan pertama mempunyai tujuan untuk memperbaiki defisit yang terjadi pada neraca berjalan dan nilai tukar rupiah. Kebijakan kedua berusaha untuk meningkatkan stabilitas pertumbuhan ekonomi dan mendorong daya beli masyarakat. Kebijakan ketiga mencoba mengendalikan laju inflasi, sementara yang keempat bertujuan untuk meningkatkan investasi. Paket kebijakan ini dilengkapi dengan berbagai tindakan aksi dan peraturan-peraturan baru yang mendukung, baik pada tingkatan Menteri maupun Presiden.

Berbagai kebijakan tersebut tampaknya akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan situasi ekonomi Indonesia. Beberapa aturan mencoba memberikan solusi untuk permasalahan yang selama ini telah dibicarakan sebagai hambatan bagi perkembangan ekonomi Indonesia, seperti perubahan tata niaga untuk impor berbagai komoditas pertanian yang selama ini menjadi latar belakang dari tingginya inflasi makanan.

Akan tetapi terlihat juga adanya konflik antara satu kebijakan dengan tujuan dari kebijakan lainnya. Pemberian insentif perpajakan dapat berakibat mengurangi penerimaan perpajakan yang berujung pada meningkatnya defisit anggaran, setidaknya untuk jangka pendek. Selain itu dampak dari kebijakan ini cenderung bersifat jangka panjang, karena lebih fokus pada permasalahan struktural. Untuk melengkapi kebijakan jangka panjang ini, Bank Indonesia juga mengeluarkan beberapa kebijakan moneter yang terkait dengan pengendalian inflasi dan nilai tukar, seperti kenaikan tingkat suku bunga acuan pinjaman dari 5,75% pada bulan Juni menjadi 7,25% pada awal bulan September.

Dengan dikeluarkannya paket kebijakan ini, pemerintah Indonesia ingin menunjukkan bahwa mereka serius dalam menangani permasalahan ekonomi. Ini penting untuk dilakukan, mengingat tahun depan (2014) adalah tahun pemilu, dimana kebijakan ekonomi sering dipergunakan untuk kepentingan propaganda politik. Tetapi kesungguhan tersebut masih harus dilihat lagi, terutama dengan berkurangnya tekanan dari luar seiring dengan keputusan *the Fed* untuk tetap menjalankan kebijakan QE yang ekspansif.

Tabel 4. Paket Kebijakan Ekonomi 2013

Paket Kebijakan	Program	Rencana Aksi	Regulasi
Perbaiki Neraca Transaksi Berjalan (<i>Current Account Deficit</i>) dan Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah.	1. Mendorong ekspor, dengan memberikan <i>additional deduction tax</i> untuk sektor padat karya yang memiliki ekspor (minimal 30% dari total produksi).	Revisi aturan <i>tax allowance</i> terkait dengan sektor usaha dan relaksasi prosedur.	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 124 tentang pemberian pengurangan besarnya pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan penundaan pembayaran PPh pasal 29 tahun 2013 bagi wajib pajak industri tertentu.
	2. Menurunkan impor migas, dengan meningkatkan porsi biodiesel dalam porsi solar, sehingga akan mengurangi konsumsi solar.	Penerbitan peraturan terkait dengan pengoptimalan pemanfaatan biodiesel untuk sektor transportasi, pembangkit dan industri guna mengurangi impor Bahan Bakar Minyak (BBM), untuk mewajibkan penggunaan 10% bahan bakar nabati di seluruh bahan bakar minyak jenis solar yang digunakan sektor transportasi, industri, dan pembangkitan listrik.	Peraturan Menteri ESDM No 25/2013 tentang perubahan Permen ESDM No 32/2008 tentang penyediaan, pemanfaatan dan tata niaga bahan bakar nabati (<i>biofuel</i>) sebagai bahan bakar lain.
	3. Menetapkan pengenaan pajak barang mewah yang berasal dari impor seperti mobil <i>completely built up</i> (CBU), <i>branded product</i> sebesar tambahan 25% sampai dengan 50%;	Revisi Peraturan Mengenai Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.	Kebijakan akan dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP) dan masih dikonsultasikan dengan DPR.
	4. Mendorong ekspor mineral dengan memberikan relaksasi prosedur yang terkait dengan kuota dan CnC;	Revisi peraturan mengenai peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengelolaan dan pemurnian mineral.	Peraturan Menteri ESDM.

	5. Menginstruksikan Pertamina untuk menggunakan transaksi <i>forward</i> dalam pengelolaan valas (tidak diumumkan ke publik).	--	Keputusan Menteri BUMN as RUPS (GMS).
	6. Mengarahkan BUMN untuk tidak mengambil kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh kepada pengetatan likuiditas dipasar, seperti meminta untuk tidak berkompetisi mencari bunga tinggi (tidak diumumkan ke publik).	--	Keputusan Menteri BUMN sebagai wakil pemilik modal/RU.
Stabilitas pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Memberikan insentif, dengan tetap memastikan bahwa <i>fiscal deficit</i> 2,38%. Dengan menjaga defisit pada batas aman ini, maka pemerintah memastikan pembiayaan APBN-P 2013 dalam kondisi aman	Insentif yang diberikan dalam jangka pendek:		
	1. Memberikan <i>additional deduction</i> untuk domestik padat karya berorientasi domestik dan padat karya berorientasi ekspor (minimal 30%) seperti tekstil, garmen, mainan, sepatu.	Revisi aturan <i>tax allowance</i> terkait dengan sektor usaha dan relaksasi prosedur.	PMK No. 124 tentang pemberian pengurangan besarnya pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan penundaan pembayaran PPh pasal 29 tahun 2013 bagi wajib pajak industri tertentu.
	2. Memberikan relaksasi pembatasan fasilitas kawasan berikat untuk produk domestik.	Revisi peraturan mengenai fasilitas kepabeanan dan perpajakan.	PMK No. 120/2013 yang mengatur relaksasi kebijakan kawasan berikat dengan penambahan alokasi untuk penjualan lokal sebesar 50% dari realisasi ekspor dari semula 75%.
	3. Penghapusan PPN buku.	Revisi peraturan Mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).	PMK No. 122/2013 tentang pemberian fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor atau penyerahan buku nonfiksi.

	4. Penghapusan PPN BM untuk produk dasar yang sudah tidak tergolong barang mewah.	Revisi peraturan mengenai Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tersebut Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.	PMK No. 121/2013 mengenai penghapusan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk produk-produk tertentu yang sudah tidak tergolong mewah.
	5. Mengarahkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk mencegah terjadinya PHK, dengan skema kenaikan UMP mengacu pada KHIIL, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dengan membedakan kenaikan untuk Upah Minimum Industri UMKM dan Industri Padat Karya dengan Industri Padat Modal.	---	
	Insentif yang diberikan dalam jangka panjang:		
	1. Additional deduction untuk R&D.	Revisi aturan terkait dengan pengurangan pajak.	Peraturan Menteri Keuangan.
	2. Mengoptimalkan Penggunaan Tax Allowance untuk insentif investasi.	Revisi aturan <i>tax allowances</i> .	Peraturan Menteri Keuangan.
Stabilisasi tingkat inflasi.	Pemerintah akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari sisi pemerintah untuk mengatasi inflasi harga bergejolak (<i>volatile food</i>) yang muncul akhir-akhir ini, maka pemerintah akan mengubah tata niaga daging sapi dan produk hortikultura dari pembatasan kuantitas atau kuota menjadi mekanisme yang mengandalkan harga.	Revisi peraturan terkait tata niaga daging sapi dan produk hortikultura.	Perubahan Peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Menteri Perdagangan mengenai tata niaga daging sapi dan produk hortikultura.

Percepatan Investasi.	1. Menyederhanakan Perijinan dengan meng-efektifkan fungsi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan menyederhanakan jenis-jenis perijinan yang menyangkut kegiatan investasi.	Saat ini sudah dirumuskan penyederhanaan perijinan di bidang investasi hulu migas dari 69 jenis perijinan menjadi 8 perijinan.	Penerbitan Peraturan Kepala BKPM.
	2. Mempercepat penerbitan Revisi Peraturan Presiden tentang Daftar Negatif Investasi (DNI) yang lebih ramah kepada investor.	Saat ini sedang dikoordinasikan pembahasan tentang Perubahan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai DNI oleh BKPM	Perpres tentang Perubahan Perpres Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dan Tertutup di Bidang Penanaman Modal
	3. Mempercepat program-program investasi berbasis agro (CPO, Kakao, Rotan), Mineral Logam (Bauksit, Nikel dan Tembaga) dengan memberikan insentif fiskal berupa <i>Tax Holiday</i> dan <i>Tax Allowance</i> , serta percepatan renegotiasi kontrak karya dan PKP2B.	Revisi aturan terkait Revisi aturan <i>tax allowances</i> dan kepebeanaan.	Peraturan Menteri Keuangan.
		Rapat koordinasi Tim Evaluasi dan Negosiasi Kontrak Karya dan PKP2B.	Dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Perekonomian.
4. <i>Debottlenecking</i> penyelesaian masalah proyek-proyek investasi strategis yang menjadi proyek pembangkit tenaga listrik, migas, pertambangan mineral, infrastruktur.	Rapat koordinasi di Kemenko Bidang Perekonomian.	--	